

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kesejahteraan suatu daerah karena menggambarkan peningkatan kapasitas wilayah tersebut dalam memproduksi barang dan jasa serta dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Setiap negara di seluruh dunia berusaha untuk mencapai kesejahteraan bagi semua warganya, termasuk Indonesia. Secara umum, kesejahteraan masyarakat terlihat dari peningkatan output per kapita yang berdampak langsung pada peningkatan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa yang semakin tinggi. Pertumbuhan ekonomi adalah faktor utama untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, dan kemakmuran suatu negara menjadi dasar bagi pengelolaan suatu negara. Kenaikan ekonomi di suatu wilayah dapat dikenali melalui pertumbuhan tingkat produktivitas produk domestik bruto (Ahrizal, 2022).

Produk domestik regional bruto dapat dijelaskan sebagai total nilai tambah yang dihasilkan oleh semua entitas usaha dalam suatu area, atau merupakan total nilai dari seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi di wilayah tersebut. Jika pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin tinggi, itu menunjukkan perbaikan dalam aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi daerah ini terlihat melalui laju pertumbuhan PDRB yang dihitung dengan harga tetap (Todaro dan Smith, 2008) dalam (Romhadhoni *et al.*, 2018). Dengan adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi, itu berarti produksi barang dan

jasa juga mengalami kenaikan, yang pada gilirannya dapat menyerap banyak tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dihitung dari pertumbuhan PDRB yang mencerminkan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di wilayah tersebut dalam periode waktu pertumbuhan tertentu. PDRB yang positif menandakan bahwa perekonomian daerah mengalami kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Wijayanti & Laksono, 2024).

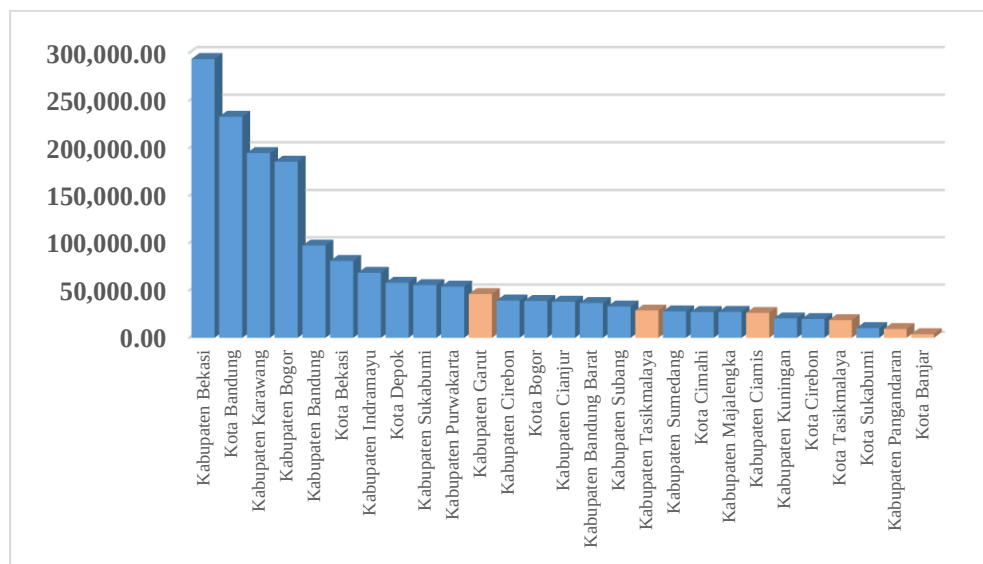
Teori pertumbuhan ekonomi endogen (*endogenous growth theory*) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor luar, tetapi juga faktor dalam seperti kualitas tenaga kerja, kebijakan pemerintah, perilaku konsumsi masyarakat, dan susunan pasar tenaga kerja. Teori ini diperkenalkan oleh Romer (1986) dan Lucas (1988) dalam Romhadhoni *et al.*, (2018) yang menyoroti pentingnya investasi di bidang pendidikan, peningkatan efisiensi tenaga kerja, serta kebijakan fiskal dari pemerintah dalam meningkatkan kemampuan produksi di jangka panjang. Ini sangat terkait dengan kondisi ekonomi di berbagai daerah di Indonesia, di mana wilayah industri yang padat modal menunjukkan angka PDRB yang lebih tinggi dibandingkan area agraris. Selanjutnya *Human capital theory* yang dipopulerkan oleh Theodore Schultz (1961) dan dikembangkan lebih oleh Gary Becker (1964) dalam Romhadhoni *et al.*, (2018), yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama menentukan variasi pendapatan dan output antar wilayah. Kemudian, *Efficiency Wage Theory* dan pendekatan Keynesian dalam Rohma & Hariani (2025) menjelaskan bahwa perusahaan dapat secara rasional menetapkan upah di atas tingkat keseimbangan pasar untuk

meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Kemudian, *Labor Supply Theory* dalam (Siregar, 2022) membahas bertambahnya partisipasi dalam angkatan bekerja akan memperbesar kapasitas produksi suatu daerah. Selain itu, Teori Desentralisasi Fiskal yang dikemukakan oleh Wallace Oates (1972) dalam Mubaraq (2026) menunjukkan bahwa pemerintahan daerah lebih efektif dalam mendistribusikan sumber daya berdasarkan kebutuhan di wilayah tersebut, sehingga dapat meningkatkan perkembangan ekonomi daerah.

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (2024), Provinsi Jawa Barat memainkan peran penting dalam ekonomi nasional karena total ekonominya termasuk yang terbesar di Indonesia, dengan struktur ekonomi yang cukup bervariasi, mencakup sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, layanan, serta sektor primer di beberapa wilayah. Data terbaru tentang kinerja makro menunjukkan bahwa ekonomi di Jawa Barat berkembang pada kisaran 4 sampai 5 persen setiap tahun. Misalnya, pada triwulan IV-2024, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tercatat sekitar 5,02 persen dibandingkan tahun lalu (*y-on-y*), yang menandakan adanya pemulihan dan dinamika yang lebih kuat di sektor tertentu setelah masa pandemi. Walaupun pertumbuhan keseluruhan provinsi terbilang positif, distribusi kontribusi PDRB antara kabupaten dan kota di Jawa Barat menunjukkan adanya ketidakmerataan yang cukup mencolok.

Perbandingan PDRB di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sangat penting untuk memahami variasi dalam tingkat aktivitas ekonomi, pusat pertumbuhan wilayah, dan potensi ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Grafik di bawah ini menunjukkan perkembangan PDRB di kabupaten/kota di

Provinsi Jawa Barat tahun 2024, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai daerah-daerah yang memiliki kontribusi ekonomi tertinggi serta wilayah yang masih membutuhkan dukungan untuk pengembangan ekonomi.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (diolah)

Gambar 1. 1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Miliar Rupiah)

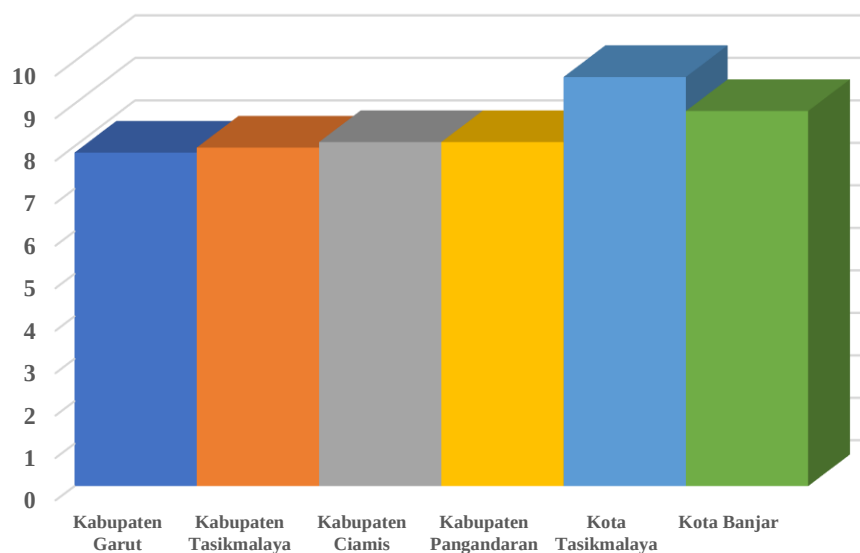
Grafik 1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam kontribusi ekonomi di berbagai wilayah. Secara keseluruhan, struktur ekonomi di Jawa Barat masih terfokus pada beberapa kabupaten/kota yang memiliki tingkat industrialisasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi. Kabupaten Bekasi menempati posisi teratas dalam kontribusi PDRB dengan angka mendekati 293.664,79 miliar rupiah. Tingginya nilai PDRB di Kabupaten Bekasi mencerminkan dominasi sektor industri manufaktur, daerah industri terpadu, serta kedekatannya dengan DKI Jakarta yang merupakan pusat pertumbuhan nasional. Kota Bandung memiliki PDRB senilai 233.053,79 miliar

rupiah, diikuti oleh Kabupaten Karawang dengan PDRB mencapai 194. 903,79 miliar rupiah, yang juga dikenali sebagai kawasan industri penting di Jawa Barat. Keberadaan wilayah-wilayah ini menunjukkan adanya konsentrasi dalam aktivitas industrinya, logistik, serta pusat permukiman yang berhubungan dengan industri dan urban. Penelitian yang dilakukan oleh Dewandaru *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa daerah yang memiliki dasar industri pengolahan yang kuat memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB regional karena aktivitas industrinya menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Oleh karena itu, tingginya PDRB di kabupaten atau kota yang berfokus pada industri ini mencerminkan dampak sektor sekunder terhadap perkembangan ekonomi di Jawa Barat.

Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bogor tergolong dalam kelompok atas dengan kontribusi PDRB yang signifikan, masing-masing sekitar 100 hingga 200 miliar rupiah. Di sisi lain, terdapat kelompok kabupaten/kota dengan kontribusi PDRB sedang, seperti Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Garut, yang memiliki nilai PDRB di bawah 100 miliar rupiah. Wilayah-wilayah ini umumnya didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan jasa daripada sektor industri besar. Sementara, beberapa kota dengan luas wilayah yang relatif kecil seperti Kota Banjar, Kota Sukabumi, dan Kota Cirebon menunjukkan nilai PDRB yang paling rendah dibandingkan kabupaten lainnya. Rendahnya PDRB di kota-kota tertentu tidak hanya disebabkan oleh aktivitas ekonomi yang lemah, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan luas wilayah, jumlah penduduk, serta basis produksi yang lebih sempit. Menurut Zega *et al.*, (2022), wilayah dengan basis ekonomi agraris dan orientasi konsumsi lokal

cenderung menghasilkan PDRB yang lebih rendah dibandingkan daerah yang terindustrialisasi. Situasi ini menunjukkan adanya ketidakmerataan dan kesenjangan struktur ekonomi antarwilayah yang mencerminkan perbedaan kapasitas produksi, konsentrasi industri, kualitas tenaga kerja, dan infrastruktur ekonomi di Jawa Barat.

Peningkatan PDRB antar wilayah pada periode 2024 juga berkaitan dengan perbaikan pada indikator sumber daya manusia, khususnya melalui peningkatan rata-rata lama sekolah. Wilayah yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi biasanya menunjukkan produktivitas kerja yang lebih optimal, sehingga mendorong terciptanya nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi (Swastika & Arifin, 2023).

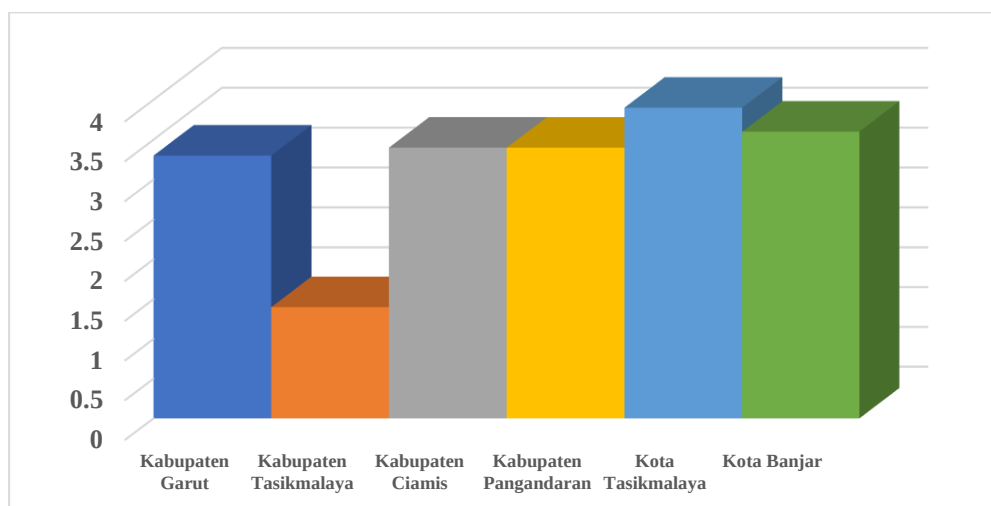


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (diolah)

Gambar 1. 2 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Priangan Timur Tahun 2024 (Tahun)

Grafik di atas menunjukkan perkembangan rata-rata lama sekolah (RLS) pada enam kabupaten/kota di wilayah Priangan Timur, yaitu Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar untuk periode 2024. Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar menempati posisi dengan rata-rata lama sekolah tertinggi dibandingkan kabupaten lain di Priangan Timur. Kedua kota ini menunjukkan semakin baiknya sarana pendidikan perkotaan, tingginya tingkat urbanisasi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan formal. Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran memiliki rata-rata lama sekolah yang lebih rendah. Situasi ini menggambarkan adanya tantangan struktural yang dihadapi wilayah pedesaan, seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, faktor ekonomi rumah tangga, serta distribusi fasilitas pendidikan yang belum merata. Kabupaten Garut, misalnya, meskipun berpenduduk besar, masih menghadapi kendala pemerataan pendidikan antar kecamatan, khususnya di daerah pedesaan dan pegunungan. Rata-rata lama sekolah mencerminkan kualitas pendidikan serta keterampilan yang dimiliki oleh angkatan kerja di suatu daerah. Angkatan kerja yang lebih berpendidikan dan terampil biasanya memiliki tingkat produktivitas yang lebih baik. Ini bisa berkontribusi dalam peningkatan produktivitas dan mendorong pertumbuhan PDRB. Akses pendidikan yang lebih mudah akan membantu masyarakat dalam memperoleh penghasilan yang lebih besar (Kurniawan & Imaningsih, 2025).

Kenaikan upah minimum akan mendorong para pekerja untuk mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli barang, sehingga terjadi siklus ekonomi (Lubis dan Murtala, 2021) dalam (Rabbani & Hasmarini, 2024).



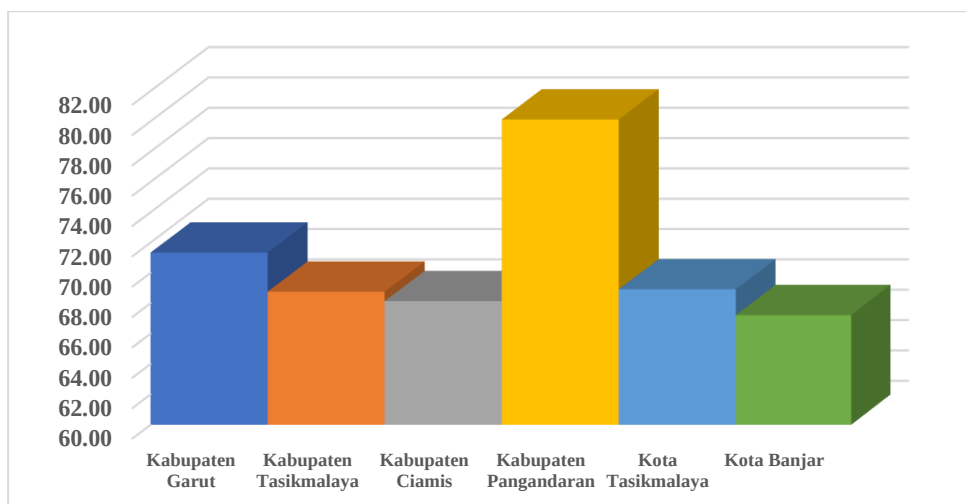
Sumber: Open Data Provinsi Jawa Barat (diolah)

Gambar 1. 3 Laju Pertumbuhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Priangan Timur Tahun 2024 (Persen)

Berdasarkan grafik 1.3 Laju Pertumbuhan Upah Minimum di Kabupaten/Kota Priangan Timur Tahun 2024, terdapat perbedaan persentase peningkatan upah minimum di berbagai daerah. Secara keseluruhan, sebagian besar kabupaten/kota mengalami kenaikan upah minimum sekitar 3,5 hingga 4 persen. Ini menggambarkan adanya kebijakan penyesuaian upah yang cukup konsisten sesuai dengan aturan nasional mengenai penetapan upah minimum.

Kota Tasikmalaya mencatat pertumbuhan tertinggi, dengan angka 3,9 persen. Hasil ini menunjukkan adanya usaha untuk meningkatkan daya beli pekerja di pusat kota yang memiliki ekonomi berbasis perdagangan dan jasa. Kota Banjar juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi mencapai 3,6 persen. Sejalan dengan (Julianto & Suparno, 2016) upah yang besar mendorong

usaha dari pekerja, dan perusahaan tidak bisa sepenuhnya mengawasi usaha yang diberikan oleh pekerja tersebut, sehingga pekerja harus menentukan sendiri seberapa keras mereka akan berusaha. Semakin tinggi gaji yang diterima, semakin besar risiko yang dihadapi pekerja jika mereka kehilangan pekerjaan. Dengan memberikan upah yang lebih tinggi, perusahaan mendorong lebih banyak pekerja untuk tidak bersikap malas, sehingga produktivitas mereka bisa meningkat. Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Pangandaran mencatat pertumbuhan sekitar 3,4 persen. Sementara itu, Kabupaten Tasikmalaya mengalami pertumbuhan yang relatif lebih rendah dibandingkan daerah lain, dengan angka 1,4 persen. Permasalahan ketertinggalan daerah ini mungkin dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah, terkait dengan isu kemiskinan, rendahnya mutu pendidikan, tingginya tingkat pengangguran, serta rendahnya produktivitas dan mutu produksi (Nuri, Wulandari dan Qomarodin, 2020) dalam (Julianto & Suparno, 2016).



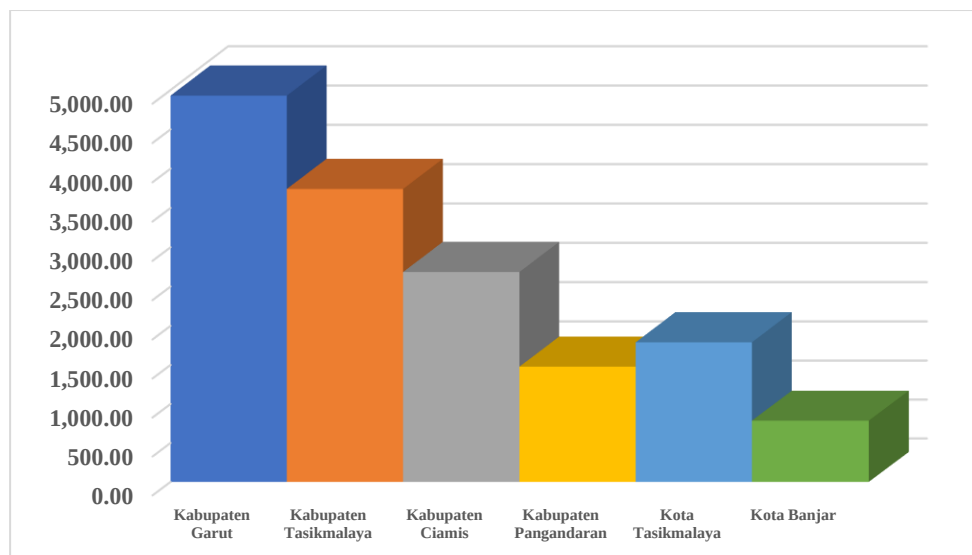
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (diolah)

Gambar 1. 4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota Priangan Timur Tahun 2024 (Persen)

Berdasarkan grafik 1. 4 di atas, terlihat bahwa terdapat variasi dalam tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten/Kota Priangan Timur pada tahun 2024. Kabupaten Pangandaran mencatatkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) tertinggi, sebesar 80,12 persen. Tingkat partisipasi yang tinggi ini menandakan bahwa mayoritas populasi usia kerja di daerah tersebut terlibat dalam aktivitas ekonomi. Hal ini bisa dijelaskan oleh karakteristik wilayah yang memiliki ekonomi yang banyak bergantung pada sektor pariwisata, perikanan, dan usaha informal yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Kabupaten Garut berada di posisi berikutnya dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 71,34 persen, diikuti oleh Kota Tasikmalaya yang berada pada angka 68,92 persen. Kemudian, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis memiliki angka TPAK yang cukup dekat, yaitu sekitar 68,14 hingga 68,76 persen. Sementara itu, Kota Banjar mencatatkan TPAK terendah, yaitu sebesar 67,22 persen jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Priangan Timur. Perbedaan dalam tingkat partisipasi angkatan kerja ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti komposisi umur penduduk, tingkat pendidikan, kondisi sosial ekonomi, dan juga kesempatan kerja yang ada di masing-masing daerah. Sejalan dengan Novita & Samsuddin (2024) Populasi yang dianggap dalam kategori usia kerja adalah individu yang berusia antara 15 hingga 64 tahun. Apabila tingkat partisipasi tenaga kerja meningkat, maka jumlah relatif tenaga kerja yang siap untuk mendukung ekonomi juga akan semakin besar, diikuti dengan peningkatan jumlah individu yang mendapatkan pekerjaan. Di sisi lain, jika semakin banyak penduduk yang masih dalam proses pendidikan dan terlibat dalam kegiatan rumah tangga, maka jumlah angkatan kerja

yang terdiri dari individu tersebut akan lebih tinggi, sehingga penyerapan tenaga kerja dalam kelompok angkatan kerja ini akan semakin menurun.

Belanja daerah mencakup semua biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan operasional, investasi, dan program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran ini meliputi belanja secara langsung dan tidak langsung yang mencakup gaji karyawan, pembangunan infrastruktur, serta program sosial (UU No. 33 Tahun 2004). Kebijakan pendapatan dan pengeluaran pemerintah (termasuk belanja daerah) akan mengangkat permintaan agregat serta menstimulasi aktivitas ekonomi, sehingga mendorong pertumbuhan output suatu wilayah (Adhim *et al.*, 2024).



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (diolah)

Gambar 1. 5 Belanja Daerah Kabupaten/Kota Priangan Timur Tahun 2024 (Miliar Rupiah)

Berdasarkan grafik pada gambar 1. 5 di atas, menunjukkan perkembangan pengeluaran daerah kabupaten/kota di kawasan Priangan Timur tahun 2024. Umumnya, pengeluaran daerah berfungsi sebagai alat fiskal yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan lokal, penyediaan layanan publik, dan mendorong kegiatan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Kabupaten Garut menunjukkan angka pengeluaran tertinggi, yaitu sebesar 4.928,49 miliar rupiah. Pengeluaran yang tinggi di Kabupaten Garut dapat dihubungkan dengan luas wilayah yang besar, jumlah penduduk yang cukup banyak, serta kompleksitas kebutuhan pembiayaan pembangunan yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Selanjutnya, Kabupaten Tasikmalaya menempati posisi kedua dengan total pengeluaran sebesar 3.741,55 miliar rupiah. Kabupaten Ciamis tercatat dengan pengeluaran sebesar 2.684,42 miliar rupiah. Sementara itu, Kabupaten Pangandaran memiliki total pengeluaran sebesar 1.478,83 miliar rupiah. Di wilayah perkotaan, Kota Tasikmalaya mencatat pengeluaran sebesar 1.790,60 miliar rupiah, sedangkan Kota Banjar merupakan daerah dengan pengeluaran terendah, yaitu sebesar 786,16 miliar rupiah. Menurut penelitian (Laksono dan Subowo, 2014:46) dalam Febriani & Mildawati (2019), pembangunan daerah yang cepat dan berkaitan dengan pertumbuhan kegiatan fiskal yang memerlukan pendanaan dari pemerintah daerah menyebabkan kebutuhan akan anggaran yang signifikan untuk pos belanja. Pos belanja itu meliputi pengeluaran rutin dan biaya pembangunan, sehingga diperlukan dana yang cukup besar untuk mendukung kegiatan tersebut. Oleh karena itu,

pemerintah daerah harus berusaha seoptimal mungkin untuk merealisasikan kegiatan yang bertujuan meningkatkan pelayanan di wilayahnya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada penggunaan laju pertumbuhan Upah Minimum Kabupaten/Kota di wilayah Priangan Timur sebagai fokus analisis dalam periode yang relatif panjang, yaitu tahun 2011-2024. Analisis dalam rentang waktu tersebut memungkinkan penelitian ini untuk mengidentifikasi pola perkembangan upah minimum secara lebih komprehensif, baik dalam bentuk tren peningkatan, perlambatan, maupun fluktuasi pertumbuhan di masing-masing daerah. Maka penulis tertarik untuk meneliti tentang permasalahan tersebut dengan judul **“ANALISIS DETERMINAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN/KOTA DI PRIANGAN TIMUR TAHUN 2011-2024”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana rata-rata lama sekolah, laju pertumbuhan upah minimum Kabupaten/Kota, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan belanja daerah berpengaruh secara parsial terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Priangan Timur pada periode 2011-2024?
2. Bagaimana pengaruh simultan rata-rata lama sekolah, laju pertumbuhan upah minimum Kabupaten/Kota, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan

belanja daerah terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Priangan Timur pada periode 2011-2024?

3. Bagaimana elastisitas rata-rata lama sekolah, laju pertumbuhan upah minimum Kabupaten/Kota, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan belanja daerah terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Priangan Timur pada periode 2011-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial rata-rata lama sekolah, laju pertumbuhan upah minimum Kabupaten/Kota, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan belanja daerah terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Priangan Timur pada periode 2011-2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh simultan rata-rata lama sekolah, laju pertumbuhan upah minimum Kabupaten/Kota, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan belanja daerah terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Priangan Timur pada periode 2011-2024.
3. Untuk menganalisis elastisitas rata-rata lama sekolah, laju pertumbuhan upah minimum Kabupaten/Kota, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan belanja daerah terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Priangan Timur pada periode 2011-2024.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Berperan dalam memperkaya kajian ilmiah mengenai ekonomi pembangunan, khususnya yang menggunakan pendekatan analisis data panel dalam lingkup daerah. Menguatkan konsep dan teori mengenai keterkaitan antara aspek pendidikan (diukur melalui rata-rata lama sekolah), laju pertumbuhan upah minimum, tingkat partisipasi angkatan kerja dan belanja daerah terhadap produk domestik regional bruto (PDRB). Serta menyediakan rujukan ilmiah bagi penelitian berikutnya yang menelaah faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi pada level regional.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Kegunaan Bagi Peneliti

Dapat mengembangkan ilmu yang didapatkan selama kuliah dan menambah wawasan ilmu pengetahuan beserta pemahaman mengenai pengaruh rata-rata lama sekolah, laju pertumbuhan upah minimum Kabupaten/Kota, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan belanja daerah terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di wilayah Priangan Timur. Penelitian ini juga menjadi sarana bagi peneliti untuk mengembangkan kemampuan analisis ekonomi regional berbasis data panel dan metode kuantitatif.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi pemerintah daerah, khususnya pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Priangan Timur, dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang berbasis pada penguatan sumber daya manusia, peningkatan daya beli masyarakat, dan pengeluaran daerah. Sehingga kebijakan pembangunan dapat difokuskan pada peningkatan akses pendidikan, perluasan lapangan kerja produktif, serta pemberdayaan ekonomi rumah tangga. Dengan demikian, kebijakan pembangunan ekonomi dapat lebih terarah dalam mengurangi kesenjangan antara wilayah metropolitan dan wilayah Priangan Timur.

1.4.3 Kegunaan Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan dasar perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tema serupa, baik dalam lingkup wilayah yang lebih luas (seperti Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan) maupun dalam konteks variabel tambahan.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Priangan Timur, yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Wilayah Priangan Timur terdiri dari beberapa kabupaten dan kota yang berada di bagian tenggara provinsi tersebut. Secara administratif, wilayah Priangan Timur meliputi: Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Banjar.

